

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut, antara lain:

- a. Keterlibatan masyarakat sipil dalam inisiasi perdamaian diantaranya ialah dengan menginisiasi pertemuan keluarga, pertukaran budaya, dan dialog/ *meeting (Ulaanbataar dialogue)*. Cara-cara tersebut diharapkan mampu menciptakan *trust* dan *mutual understanding* diantara pihak yang berkonflik sehingga mampu untuk menemukan satu persamaan yang dapat mengikatkan kembali perasaan persaudaraan atau "*cheong/ simcheong*" dalam bahasa Korea. Meskipun demikian, sejauh ini keterlibatan masyarakat sipil dalam proses inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea sebagai *track II* dirasa belum mampu berjalan dengan optimal. Dalam pelaksanaannya tetap perlu adanya dukungan dari *track I* sebagai pihak yang berperan dalam level pengambilan kebijakan
- b. Secara umum terdapat empat dinamika yang dihadapi oleh masyarakat sipil (GPPAC) dalam keterlibatannya terkait upaya perdamaian di Semenanjung Korea, yakni:
 1. Memori kolektif terkait perang dimasa lampu berakibat pada sulitnya membangun "*trust*" diantara pihak yang berkonflik
 2. Mengecilnya kelompok masyarakat yang menginginkan reunifikasi di Korea Selatan, khususnya kalangan muda yang berusia 20-an tahun atau diistilahkan sebagai "*isipdae*"
 3. Kuatnya aliansi antara Korea Selatan dengan Amerika Serikat di Semenanjung Korea memicu ketegangan dengan Korea Utara
 4. Kesulitan GPPAC dalam memperoleh pendanaan untuk kegiatan perdamaian di Semenanjung Korea

5.2 Saran

5.2.1 Praktis

Telah disebutkan sebelumnya bahwa tantangan dari GPPAC sebagai *track II* ialah mendorong bagaimana agar proses dalam rana *track I* kembali dihidupkan. Karena sejatinya, proses resolusi konflik sendiri butuh kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu, sebagai salah satu negara yang memiliki kedekatan hubungan sejarah dengan Korea Utara dan hubungan kerjasama ekonomi serta politik dengan Selatan, Indonesia dinilai memiliki posisi yang cukup strategis dalam menginisiasi perdamaian di Semenanjung Korea.

Sudah saatnya Indonesia menunjukkan kekhasan karakter kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif di hadapan negara-negara di dunia. Yang dimaksud dengan bebas aktif ialah bukan netral melainkan justru harusnya lebih aktif. Sebagai salah satu negara yang senantiasa menjunjung tinggi nilai toleransi, penghormatan terhadap HAM dan dengan jelas tercatat di dalam konstitusi negara bahwa perdamaian abadi merupakan bangsa Indonesia, maka menjadi inisiator perdamaian di Semenanjung Korea bukanlah hal yang mustahil. Indonesia bisa menjadi pelopor dan mengajak negara-negara di kawasan Asia Tenggara melalui forum ARF (*Asean Regional Forum*) untuk menjadi fasilitator dialog bagi Korea Utara dan Selatan dalam rana *track I*. ASEAN dapat dijadikan sebagai instrumen membangun perdamaian di Semenanjung Korea bukan tanpa alasan. Jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan lainnya, negara-negara di ASEAN justru memiliki pandangan positif yang lebih besar kepada Korea Utara. Tinggal bagaimana Indonesia menumbuhkan serta mengajak dan meyakinkan negara anggota ASEAN lainnya untuk ikut terlibat, mengingat kegiatan diplomatik tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh *political will* negara tersebut.

Selain dalam tatanan *track I*, Indonesia melalui Universitas Pertahanan juga memiliki kesempatan yang besar untuk ikut memberikan kontribusi terhadap proses resolusi konflik di Semenanjung Korea melalui pendekatan secara *U to U*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya

bahwa Korea Utara memang tertutup namun jika sifatnya Universitas maka mereka cenderung akan lebih terbuka. Unhan bisa menjadi *starting up* untuk memulai inisiasi perdamaian dalam level *track II* di Semenanjung Korea, mengingat Korea Utara dari sisi perguruan tinggi akan lebih terbuka dan mau membuka ruang untuk berkomunikasi.

Adapun pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui program KKLN (Kuliah Kerja Luar Negeri) ke Korea Utara, meskipun ketika berada di sana mungkin tidak akan leluasa namun secara praktis dan keilmuan hal tersebut bisa diterapkan khususnya membuka opsi dan peluang lain terkait resolusi konflik di Semenanjung Korea. Pendekatan *U to U* juga dapat dilakukan oleh Universitas Pertahanan dengan membuka kesempatan untuk pertukaran mahasiswa dan memungkinkan bagi mahasiswa dari Korea Utara dan Selatan belajar di Universitas Pertahanan. Meskipun dalam kenyataannya nanti baik mahasiswa Korea Utara dan Selatan mempelajari hal-hal yang sifatnya jauh dari konflik dan perdamaian di Semenanjung Korea, namun kehadiran mereka dalam satu tempat yang sama memungkinkan bagi mereka untuk saling bergaul dan berinteraksi satu sama lain. Peluang-peluang inilah yang harus terus dikembangkan.

5.2.2 Teoritis

Keterlibatan masyarakat sipil dalam proses inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea merupakan solusi alternatif dalam upaya resolusi konflik. Dialog yang dilakukan harus terus dilanjutkan dan dilakukan secara berkala, mengingat semakin sering dan intens dua pihak yang berkonflik maka, memungkinkan terciptanya rasa percaya dan saling mengerti atau *cheong*. Rasa percaya dan *cheong* merupakan modal yang paling penting dalam membangun proses perdamaian.

Berkaca pada faktor kepemimpinan, dari sisi Korea Selatan setelah terpilihnya Moon Jaen, sebetulnya memiliki peluang yang cukup besar bagi perdamaian di Semenanjung Korea. Pemerintahan Moon memungkinkan kembali kebijakan *Sun Shine Policy* dan dukungan Korea Selatan kepada Korea Utara lebih baik dibandingkan pemimpin

sebelumnya. Presiden Moon lebih memilih mengajak Korea Utara untuk berdialog meskipun masih ada sentimen negatif dari kedua negara namun, secara teoritis hal tersebut merupakan langkah awal terjalannya hubungan yang lebih baik diantara kedua negara.

Dengan demikian, peluang bagi terciptanya terobosan *leadership* akan lebih terbuka di era presiden Moon. Perdamaian ialah *zone of possibility* dimana jika satu upaya gagal maka harus membuka peluang yang lainnya. Kemacetan *track I* yang saat ini dialami dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea bisa saja diterobos dengan *leadership* yang kuat. Didorong dengan inisiatif yang kuat dari pemimpin dan besarnya dorongan dari *track II*, perdamaian di Semenanjung Korea bukanlah hal yang mustahil.

Saran selanjutnya ialah, menjadikan semenanjung Korea sebagai persemakmuran Korea. Dimana untuk mencapai perdamaian, baik Korea Selatan maupun Utara tidak perlu melakukan unifikasi atau penggabungan negara dalam satu administrasi. Tetap menjadi dua identitas negara yakni Korea Selatan dan Utara, namun reformasi ekonomi, politik, dan sosial tetap berjalan. Dalam artian, kedua negara harus saling mendukung dalam satu kesatuan yakni Korea yang damai. Masyarakat bebas untuk bertemu dan berpergian baik dari Selatan ke Utara atau sebaliknya. Semua hal tersebut pasti akan terjadi, dan pertama-tama yang harus dilakukan ialah mengganti perjanjian gencatan senjata menjadi perjanjian damai.